

JGLP

Journal of Governance and Local Politics

Journal of Governance and Local Politics (JGLP)	Vol. 4	No. 1	Page 001-124	May 2022	ISSN 1684-9992
---	--------	-------	--------------	----------	----------------



JGLP

Journal of Governance and Local Politics

1-11	Konflik Partai Gerindra dan PKS dalam Proses Pengisian Kekosongan Posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta Dinda Mutia Khaerun Nisa, Sri Budi Eko Wardani
12-21	Reproduksi Kuasa: Politik Etnis Tionghoa dalam Kontestasi Pemilihan Legislatif Kota Makassar) Asfar Mutaaly Bareilly, Gustiana A Kambo, Muhammad
22-32	Politik Pencalonan Pasangan Suami-Istri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Sekaran Kabupaten Bojonegoro dan Desa Lembor Kabupaten Lamongan Anang Fajrul Ukhwaluddin, Valina Singka Subekti
33 – 46	Oposisi Masyarakat Sipil Kontra Hegemoni Negara Melalui Media Sosial Youtube di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo Ali Ikhwan, Sri Budi Eko Wardani
47 – 54	Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Era New Normal Sadar
56 – 69	The Constraining Dynamics to Promote the Inclusive Village Governance in an Autocratic Leadership Setting Muhammad Taufiq, Rahmad Hidayat
70 – 84	Sinergitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kodim 0816 Sidoarjo Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Dewi Kurniasih, Aulia Zharifah
85 – 102	Collective Action Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Percepatan Pariwisata Desa Labuan Kertasari untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Ilham Zitri
103 – 117	Mengukur Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Rifaid, M. Ulfatul Akbar Jafar, M. Taufik Rachman, Johan Natirius
118 – 124	Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Tradisi Lisan Iko-Iko Suku Bajau Di Sulawesi Tenggara Abdul Hakim

Oposisi Masyarakat Sipil Kontra Hegemoni Negara Melalui Media Sosial Youtube di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Ali Ikhwan¹, Sri Budi Eko Wardani²

Universitas Indonesia, Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

Corresponding Author: alisunde@gmail.com

Keyword:
Hegemony;
Civil Society;
Youtube.

Abstract: *This study aims to determine the pattern of civil society's opposition to the state hegemony in the era of communication technology and the widespread use of social media, especially Youtube. The focus of this research is the phenomenon of civil society opposition through social media Youtube in the era of President Joko Widodo for the period 2019-2024. The research uses qualitative methods with primary data sources coming from in-depth interviews with "Youtube activists". The findings of this study indicate that in the midst of the strengthening of the state vis a vis civil society and restrictions on critical voices in mainstream media, critical groups find new fields on Youtube social media to articulate critical voices, propose alternative discourses, conduct civic education, as well as political control. However, this activity is not without risk, because in reality they have to deal with threats ranging from criminal prosecution to the threat of virtual attacks from "buzzers" formed by the state. A number of Youtube activists were convicted for the content they created. Facing the threat of punishment, Youtube activists try to protect themselves by forming a press institution.*

Kata Kunci:
Hegemoni;
Masyarakat Sipil;
Youtube.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengetahui pola oposisi masyarakat sipil kontra hegemoni negara di era teknologi komunikasi dan meluasnya penggunaan media sosial, khususnya Youtube. Fokus penelitian ini adalah fenomena oposisi masyarakat sipil melalui media sosial Youtube di era Presiden Joko Widodo periode 2019-2024. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer berasal dari wawancara mendalam dengan para "aktivis Youtube". Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa di tengah menguatnya negara vis a vis masyarakat sipil dan pembatasan suara kritis di media mainstream, kelompok kritis menemukan medan baru di media sosial Youtube untuk mengartikulasikan suara kritis, mengemukakan wacana alternatif, melakukan pendidikan kewargaan, sekaligus kontrol politik. Namun, aktivitas ini bukan tanpa risiko, sebab dalam kenyataannya mereka harus berhadapan dengan ancaman mulai dari pidana hingga ancaman serangan virtual dari buzzer bentukan negara. Sejumlah aktivis Youtube dipidanakan karena konten yang dibuatnya. Menghadapi ancaman pidana, para aktivis Youtube berusaha memproteksi diri dengan membentuk lembaga pers.

PENDAHULUAN

Oposisi di luar struktur kenegaraan yang diperankan masyarakat sipil (*civil society*) terlihat semakin meluas. Salah satu pemicunya adalah mampatnya saluran-saluran formal di lembaga resmi DPR karena mayoritas partai di parlemen masuk atau lebih tepatnya direkrut ke dalam koalisi pendukung pemerintah. Akibatnya, oposisi yang dilakukan masyarakat mulai muncul. Menurunnya fungsi pengawasan dari parlemen karena mayoritas menjadi pendukung eksekutif menjadi penyumbang signifikan terhadap memburuknya indeks demokrasi Indonesia (dw.com, 2021). Ditambah dengan menurunnya indeks kebebasan pers (katadata.co.id, 2021), membuat kelompok kritis

melirik media sosial sebagai sarana untuk melakukan oposisi terhadap kebijakan dan langkah-langkah kekuasaan. Salah satu media sosial yang menjadi media kritis adalah Youtube yang merupakan media sosial paling populer di Indonesia (datareportal.com, 2021).

Youtube banyak digunakan sebagai media untuk menyuarakan pandangan politik. Dalam konteks ini, penulis membagi dalam tiga kategori. *Pertama*, akun Youtube pro pemerintah. *Kedua*, akun Youtube yang akomodatif terhadap semua pihak, baik kalangan pendukung pemerintah maupun oposisi terhadap kekuasaan. *Ketiga*, akun Youtube yang mengambil peran oposisi terhadap kekuasaan. Di antaranya akun Rocky Gerung Official, Haris Azhar, dan Refly Harun. Dari tiga kategori Youtuber politik tersebut, riset ini akan lebih fokus kepada katagori ketiga, yaitu Youtube “bergenre” oposisi politik. Mereka melakukan gerakan oposisi sebagai upaya melakukan wacana tanding terhadap hegemoni negara (*counter-hegemony*).

Terbukanya ruang publik yang bebas membuat negara tindak nyaman. Karena itu, dibutuhkan perangkat untuk mencegah ruang publik melemahkan negara. Negara (*state*) lantas memperbesar hegemoninya atas masyarakat sipil (*civil society*). Hegemoni sendiri menurut Antonio Gramsci (2013) adalah sebuah konsensus penerimaan ideologi kelas yang menghegemoni oleh kelas yang terhegemoni. Hegemoni bukan hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, tetapi hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Roger Simon (1999) menjelaskan, titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah ketika suatu kelas menjalankan kekuasaan terhadap kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi sekaligus.

Melalui konsep hegemoni, Gramsci berargumentasi bahwa agar kekuasaan dapat abadi dan langgeng membutuhkan paling tidak dua perangkat kerja. *Pertama*, adalah perangkat kerja yang mampu melakukan tindak kekerasan yang bersifat memaksa atau dengan kata lain kekuasaan membutuhkan perangkat kerja yang bernuansa *law enforcemant*. Perangkat kerja ini biasanya dilakukan oleh pranata negara (*state*) melalui lembaga-lembaga seperti hukum, militer, polisi dan bahkan penjara. *Kedua*, adalah perangkat kerja yang mampu membujuk masyarakat untuk taat pada mereka yang berkuasa melalui kehidupan beragama, pendidikan, kesenian dan bahkan juga keluarga (Heryanto, 1997). Perangkat karja ini biasanya dilakukan oleh pranata masyarakat sipil (*civil society*) melalui lembaga-lembaga masyarakat seperti LSM, organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban-paguyuban, dan kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*). Dengan demikian supermasi kelompok penguasa atau kelas sosial tampil dalam dua cara yaitu dominasi atau penindasan dan kepemimpinan intelektual dan moral atau hegemoni (Hendarto, 1993:74).

Dalam proses hegemoni bisa munculnya *counter-hegemony* (kontra hegemoni) sebagai sebuah sikap sekaligus bentuk perlawanan dari kelas-kelas yang terkuasai (Hobden & Jones, 2001). Upaya ini dapat diartikan untuk mengganti sebuah hegemoni, membuat hegemoni tandingan, atau keduanya yakni membuat hegemoni tandingan sebagai hegemoni baru (Simon,1999). Kondisi ini bisa terjadi apabila kelas penguasa gagal dalam upaya meminta, atau secara paksa mengekstraksi persetujuan dari massa luas (Boggs, 1976). Jika keadaan ini berlangsung, Gramsci menyebut kelas penguasa tidak lagi “memimpin” tetapi hanya “dominan” menjalankan kekuatan koersif saja. Kontra hegemoni akan terus berjalan apabila mendapat dukungan berupa peran serta intelektual organik dan keberadaan *civil society* yang berdaya. Kemunculan wacana *civil society* dan intelektual organik ke permukaan secara intensif diasosiasikan sebagai representasi *counter-hegemony*. Gramsci menekankan pada peran cendekiawan guna mengupayakan kontra hegemoni yang memberikan ruang untuk partisipasi massa.

Conter-hegemony dilakukan melalui perang kontra diskursus yang dipelopori kaum cendekiawan demi membangun kesadaran sehingga dukungan luas dari segenap lapisan kelas mampu didapatkan.

Munculnya media sosial, termasuk Youtube, memungkinkan kelompok cendekiawan menyebarluaskan gagasan-gagasannya untuk melakukan *counter-hegemony*. Caleb T. Carr dan Rebecca A. Hayes (2015) mendefinisikan media sosial sebagai media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dan mempresentasikan diri, baik secara langsung atau tunda, kepada masyarakat luas untuk mempromosikan nilai konten yang dibuat pengguna dan membentuk interaksi dengan orang lain. Media sosial memiliki kekuatan konten yang dibuat pengguna atau *user-generated content* (UGC), di mana konten diproduksi oleh pengguna, bukan dari editor seperti media massa pada umumnya.

Bagaimana *civil society* menggunakan media sosial Youtube sebagai sarana untuk melakukan kritik terhadap hegemoni kekuasaan akan menjadi fokus utama penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui pola oposisi masyarakat sipil (*civil society*) kontra negara (*state*) di era kemajuan teknologi komunikasi dan meluasnya penggunaan media sosial. Serta, mengidentifikasi bentuk-bentuk respons negara (*state*) terhadap gerakan kritis masyarakat sipil (*civil society*) melalui media sosial. Hasil penelitian ini dapat dipakai untuk mengembangkan keilmuan di bidang politik, khususnya dalam hal pola komunikasi politik antara masyarakat sipil dengan pemegang kekuasaan (*state*) dan bagaimana media sosial akan menggantikan fungsi media formal (pers) sebagai pilar keempat demokrasi.

METODE PENELITIAN

Bagaimana media sosial Youtube digunakan sebagai sarana oposisi masyarakat sipil terhadap hegemoni negara? Tulisan ini berusaha menjawabnya melalui penelitian kualitatif, suatu metode penelitian untuk menghasilkan data deskriptif dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Moleong, 1998: 4). Data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang kompeten.

Para informan atau nara sumber dikategorikan dalam tiga kategori. *Pertama*, aktivis pengguna media sosial Youtube atau aktivis youtube. Mereka adalah Haris Azhar (kanal Youtube "Haris Azhar"), Hersubeno Arief (kanal "Hersubeno Point"), dan Refly Harun (kanal Youtube "Refly Harun"). *Kedua*, pemimpin redaksi yang menaungi para aktivis Youtube. Mereka adalah Mangarahon Dongoran (Pemimpin Redaksi FNN) dan Eko Satiya Hushada (Pemimpin Redaksi SNN). *Ketiga*, pakar di bidang politik dan komunikasi politik. Mereka adalah Gun Gun Heryanto, doktor ilmu komunikasi dan pengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Djayadi Hanan, PhD ilmu politik, direktur lembaga survei LSI, dan pengajar ilmu politik di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

HASIL DAN DISKUSI

Bagian ini berisi hasil penelitian penulis mengenai aktivitas kritis melalui media sosial Youtube yang dilakukan elemen masyarakat sipil. Bagian ini dibagi dalam tiga sub-pembahasan. Pertama, latar belakang kelompok kritis memaksimalkan penggunaan media sosial Youtube sebagai media oposisi. Kedua, jenis-jenis ancaman yang diterima kelompok kritis tersebut karena konten yang mereka publikasikan di Youtube. Dan,

ketiga upaya mereka untuk meminimalisir risiko karena sikap kritis yang mereka suarakan.

Oposisi Masyarakat Sipil Melalui Youtube

Media sosial Youtube belakangan banyak dipakai sebagai sarana komunikasi politik, bahkan media perlawanan politik. Akun Youtube yang mengambil peran oposisi terhadap kekuasaan ini dua kategori. *Pertama*, akun mandiri atau *lone wolf*. Akun ini dikelola secara mandiri dan tidak menjadi bagian dari ekosistem media lain. *Kedua* adalah akun yang berafiliasi ke lembaga yang teregistrasi sebagai lembaga pers. Baik yang mengambil jalan mandiri (*lone wolf*), maupun yang terasosiasi dengan lembaga pers umumnya dilakukan oleh orang yang masuk kategori terdidik atau intelektual. Mereka melakukan gerakan oposisi sebagai upaya melakukan wacana tanding terhadap hegemoni negara (*counter-hegemony*). **Tabel 1** memperlihatkan sejumlah elemen masyarakat sipil yang menggunakan kanal Youtube untuk bersuara kritis antara lain Rocky Gerung melalui kanal Rocky Gerung Official, Hersubeno Arief melalui kanal Hersubeno Point, Refly Harun dengan kanal Refly Harun, Chusnul Mar'iyah dan Ichsanuddin Noorsy dengan kanal IC Real Show, Haris Azhar dengan kanal Haris Azhar dan lain-lain.

Tabel 1. Kanal Youtube Oposisi Kategori Personal

No.	Nama Kanal	Pengelola	Dibentuk	Subscriber (Januari 2022)
1.	Refly Harun	Refly Harun	22 Maret 2020	1,95 juta
2.	Rocky Gerung Official	Rocky Gerung	4 September 2019	1,13 juta
3.	Hersubeno Point	Hersubeno Arief	18 Oktober 2016	709 ribu
4.	Haris Azhar	Haris Azhar	18 Januari 2019	217 ribu
5.	Bang Edy Channel	Edy Mulyadi	29 September 2015	214 ribu
6.	Haikal Hassan Official	Haikal Hassan	8 Oktober 2011	47,3 ribu
7.	IC The Real Show	Chusnil Mariyah & Ichsanuddin Noorsy	14 September 2020	13,9 ribu

Sumber: socialblade.com

Sementara itu, sebagaimana terlihat di **Tabel 2**, secara kelembagaan YLBHI dan KontraS juga aktif bersuara kritis melalui kanal Yayasan LBH Indonesia dan KontraS. Konten yang disajikan umumnya menyangkut isu-isu yang menjadi idealisme di bidang masing-masing. Kanal Yayasan LBH Indonesia dan KontraS misalnya, banyak menyoroti isu-isu hukum, hak asasi manusia, dan demokratisasi. Sementara itu, Watchdoc Documentary lebih banyak mengusung isu-isu lingkungan hidup. Mereka mendorong penguatan masyarakat sipil dan terciptanya *good governance*.

Tabel 2. Kanal Youtube Oposisi Kategori Lembaga

No.	Channel	Pengelola	Dibentuk	Subscriber (Januari 2022)
1.	Watchdoc Documentary	Watchdoc	4 Februari 2011	413 ribu
2.	KontraS	KontraS	27 Juni 2011	21,2 ribu
3.	Yayasan LBH Indonesia	YLBHI	2 November 2018	5,06 ribu

Sumber: socialblade.com

Salah satu karakteristik dari kelompok kritis yang menyalurkan sikapnya melalui media sosial Youtube umumnya didominasi kelompok senior secara usia (**Tabel 3**). Mengapa aktivis Youtube didominasi kelompok senior? Ilmuwan komunikasi politik Gun Gun Heryanto (wawancara 22 Desember 2021) melihat langkanya aktivis muda yang menggunakan platform media sosial Youtube karena tiga faktor. *Pertama*, menyangkut pengetahuan (*knowledge*). Suara oposisional bukan hanya butuh keberanian, tapi juga *knowledge* menyangkut isu yang diperbincangkan. Kurangnya *knowledge* membuat aktivis muda ragu untuk masuk ke area itu, karena mengusung narasi oposisi berisiko untuk di-*bully* oleh *buzzer* dan ada potensi berurusan dengan hukum. Untuk melakukan oposisi melalui Youtube membutuhkan *landscape* pengetahuan yang memadai supaya memiliki semacam *scurity of voice*.

Kedua, soal habit. Generasi Y atau sering disebut milenial (lahir 1981-1995) umumnya tidak banyak masuk ke wilayah suara oposisional, tapi lebih fesyen dan *pop culture* karena topik-topik itu mudah di-*share* dan mudah disukai. Mereka cenderung suka dengan isu-isu yang *soft*, terutama di wilayah *pop culture*. Untuk masuk ke wilayah yang punya tendensi serius apalagi berisiko, masih sedikit kelompok ini yang tertarik. Apalagi bagi generasi Z (lahir 1996-2010), politik masih diposisikan sebagai *outside*, belum menjadi *inside*. *Ketiga*, menyangkut jaringan. Kelompok yang tumbuh dalam aktivisme politik, baik sebagai aktivis di kampus yang bertransformasi kemudian menjadi jurnalis atau bertransformasi menjadi akademisi, itu *networks* di politik cenderung lebih banyak. Padahal, rumus mengelola Youtube ada kesamaan dengan rumus media mainstream. Selain butuh *news value*, juga butuh sosok *prominence*, atau tokoh yang dikenal khalayak, untuk ditampilkan di media. Aspek jaringan politik ini yang kurang dimiliki kelompok muda (generasi YZ). Kanal Youtube yang diinisiasi oleh orang yang tidak dikenal dipastikan akan kesulitan untuk menghadirkan nara sumber yang prominen.

Tabel 3. Usia Aktivis Youtube

No.	Nama	Lahir	Profesi
1.	Ichsanudin Noorsy	9 September 1958	Ekonom
2.	Rocky Gerung	20 Januari 1959	Aktivis, Dosen
3.	Chusnul Mari'yah	17 Oktober 1961	Dosen, Aktivis
4.	Hersubeno Arief	29 Desember 1963	Wartawan
5.	Edy Mulyadi	8 Agustus 1966	Wartawan
7.	Haikal Hassan	21 Oktober 1968	Pembicara Publik, Dai
8.	Refly Harun	26 Januari 1970	Lawyer, Dosen
9.	Haris Azhar	10 Juli 1975	Lawyer, Aktivis

Sumber: Data diolah

Para aktivis menilai ada pembatasan ruang untuk bersuara kritis di media mainstream, khususnya televisi. Aktivis HAM Haris Azhar mengaku mengintensifkan kanal Youtube "Haris Azhar" setelah ditutupnya program Indonesia Lawyer Club (ILC) yang tayang di TV ONE. Karena itu, perlu kanal-kanal baru untuk memfasilitasi suara kritis masyarakat. Haris menilai rezim saat ini makin banyak menunjukkan kelemahan, kesalahan, dan kepongahan yang berdampak pada makin banyaknya korban, protes, dan lain-lain. Karena itu perlu kanal untuk menyuarakan suara-suara kritis.

"Kenapa saya bikin Youtube? Salah satunya karena ILC ditutup. Saya merasa perlu ada kanal-kanal yang baru untuk memfasilitasi suara kritik." (wawancara Haris Azhar, 13 Desember 2021)

Hal yang sama disampaikan oleh aktivis dan ahli hukum tata negara Refly Harun yang mengelola kanal Youtube “Refly Harun”. Salah satu yang mendorongnya membuat kanal Youtube adalah Metro TV yang mem-*banned* dirinya. Refly menjelaskan, sejak Juni 2018 dirinya tidak lagi diundang Metro TV untuk menjadi nara sumber. Padahal, sebelumnya dia merasa sebagai *darling*-nya Metro TV.

“Tapi, ketika saya mulai kritis terhadap pemerintahan Jokowi, Metro TV itu mem-*banned* saya sejak Juni 2018. Sampai sekrang (Metro TV) sudah tidak mengundang saya sebagai nara sumber. Metro TV itu trigger. Tapi alasan yang substantif adalah saya punya media sendiri untuk menyalurkan idealisme dan pengetahuan saya di bidang hukum tata negara. Saya ini, the nature of Refly Harun itu kritis.” (wawancara Refly Harun, 16 Desember 2021)

Hersubeno Arief, jurnalis senior yang bersuara kritis kepada kekuasaan melalui akun Youtube “Hersubeno Point” menjelaskan mengapa media mainstream membatasi suara kritis kepada pemerintah. Ia menyebut kepentingan ekonomi yang dipicu oleh konglomerasi media menjadi sebab hilangnya suara kritis media *mainstream* atau media konvensional. Hilangnya sikap kritis media massa saat ini digambarkan sebagai sebagai fenomena bunuh diri massal pers Indonesia.

“Ada bunuh diri massal pers Indonesia. Itu ternyata mengilhami teman-teman wartawan yang sudah sudah tidak tidak terikat dengan lembaga pers tertentu sepakat dengan pandangan saya bahwa media sekarang terkooptasi oleh penguasa.” (Wawancara Hersubeno Arief, 13 Desember 2021)

Media sosial Youtube menjadi media baru sekaligus media alternatif untuk mendeseminasikan ide-ide. Haris Azhar mengaku membuat kanal Youtube mula-mula karena tren orang menggunakan Youtube. Aktivitas ini dimulai pada awal 2019. Dia melihat gelombang penggunaan media sosial, termasuk Youtube, muncul di mana-mana. Dunia IT juga berkembang, sehingga dirinya memutuskan mengambil peran di situ. Alasannya, *trust* publik yang tinggi membuat mereka datang untuk menyampaikan banyak hal. Karena tidak bisa direspons semua dalam pendekatan hukum, maka digunakan pendekatan media, dalam hal ini Youtube. Dan, kenyataannya banyak orang yang masalahnya didiskusikan dan didengarkan melalui diskusi di Youtube ternyata senang. Adanya kanal Youtube bisa membantu dalam konteks pelayanan publik, seiring aktivitasnya yang semakin serius menjalani profesi sebagai lawyer.

Sementara itu, wartawan senior Hersubeno Arief mengungkapkan, aktivitas yang dilakukan di Youtube adalah aktivitas kewartawanan yang memanfaatkan saluran media sosial tersebut. Dalam Undang-Undang Pers, penggunaan saluran-saluran seperti Youtube itu dibenarkan. Refly Harun meyakini Youtube akan semakin menjadi media arus utama dan televisi akan semakin hilang. Saat ini, orang banyak menonton televisi justru dari channel Youtube-nya. Karena itu, posisi Youtube akan semakin kuat. Menurut catatan Youtube Analytic, audiens terbesar kanal Refly Harun seperti terlihat di **Tabel 4** ada di rentang usia 25-34 tahun dengan persentase 25 persen. Disusul usia 34-44 tahun dengan persentase 20,8 persen. Kemudian rentang usia 45-54 tahun dengan jumlah 18,7 persen, kelompok usia 55-64 tahun sebanyak 14,8 persen, lalu kelompok usia 18-24 tahun sebanyak 12,9 persen, disusul kelompok usia di atas 65 tahun sebanyak 6,6 persen, dan yang paling kecil adalah kelompok usia 13-17 tahun sebanyak 1,20 persen.

Tabel 4. Data Usia Audiens Kanal Refly Harun

No	Usia (tahun)	Persentase
1.	25-34	25,5%
2.	33-44	20,8%
3.	45-54	18,7%
4.	55-64	14,8%
5.	18-24	12,9%
6.	65+	6,6%
7.	13-17	1,20%

Sumber: Youtube Analytics

Sementara itu, dari segi gender, kanal Refly Harun banyak diakses oleh audiens laki-laki. Menurut Youtube Analytics, tercatat 82,6 persen adalah audiens laki-laki dan hanya 17,4 persen audiens perempuan (**Tabel 5**). Isu politik dan tata negara yang diusung Refly Harun terlihat menjadi faktor mengapa kelompok gender laki-laki mendominasi jumlah audiens di kanal tersebut.

Tabel 5. Data Gender Audiens Kanal Refly Harun

No	Gender	Persentase
1.	Laki-laki	82,6%
2.	Perempuan	17,4%

Sumber: Youtube Analytics

Sama seperti kanal Refly Harun, audiens terbesar kanal Haris Azhar juga ada di rentang usia 25-34 tahun dengan persentase 32,6 persen (**Tabel 6**). Disusul kelompok usia 35-44 tahun sebesar 20,7 persen, kemudian 18-24 tahun sebesar 16,2 persen, kelompok usia 45-54 tahun sebesar 15,0 persen, kelompok usia 55-64 tahun sebanyak 10,5 persen. Lalu kelompok usia 65 tahun ke atas sebesar 4,0 persen dan terakhir kelompok usia 13-17 tahun sebanyak 1,0 persen.

Tabel 6. Data Usia Audiens Kanal Haris Azhar

No	Usia (tahun)	Persentase
1	25-34	32,6%
2	33-44	20,7%
3	18-24	16,2%
4	45-54	15,0%
5	55-64	10,5%
6	65+	4,0%
7	13-17	1,0%

Sumber: Youtube Analytics

Dari segi gender, audiens didominasi laki-laki dengan jumlah 82,8 persen dan perempuan 17,2 persen (**Tabel 7**). Kanal Haris Azhar memiliki kesamaan isu dengan kanal Refly Harun yang mengusung konten berkaitan dengan politik, hukum, dan hak asasi manusia. Karena itu, terlihat ada kemiripan persentase audiens laki-laki di angka 80-an persen. Dan, audiens perempuan di angka 17-an persen.

Tabel 7. Data Gender Audiens Kanal Haris Azhar

No	Gender	Persentase
1	Laki-laki	82,2%
2	Perempuan	17,2%

Sumber: Youtube Analytics

Dari pengelompokan usia, dua kanal menunjukkan adanya kesamaan, yakni audiens terbesar berasal dari kelompok usia 25-34 tahun, disusul kelompok usia 35-44

tahun. Ahli komunikasi politik Gun Gun Heryanto menilai jumlah penonton terbanyak di rentang usia 25-35 bukan berarti di usia tersebut mereka lebih memiliki *concern* terhadap politik, tetapi lebih karena target audiens Youtube memang ada di rentang usia tersebut. Misalnya, dialog politik yang disiarkan di tv konvensional umumnya tidak ditonton kelompok milenial. Tapi, ketika dialog tersebut di-upload ke Youtube, baru banyak kelompok usia muda menonton. Ini lebih pada media habit yang bergeser ke media sosial Youtube. Besarnya kelompok usia di bawah 40 tahun yang menonton Youtube juga mengonfirmasi bahwa penetrasi internet beberapa tahun belakangan, khususnya media sosial, proporsi terbanyak ada di kelompok generasi YZ.

Ancaman kepada Aktivistis Youtube

Survei SMRC (2021) menunjukkan masyarakat Indonesia menilai keadaan kebebasan sipil memburuk di era Jokowi. Pada 2009, hanya 17 persen responden takut berbicara tentang politik. Sepuluh tahun kemudian, jumlahnya hampir tiga kali lipat menjadi 43 persen, dan pada tahun 2021 menjadi 39 persen. Pada tahun 2009, ketakutan akan penangkapan sewenang-wenang jumlahnya mencapai 27 persen. Situasinya memburuk menjadi 38 persen pada 2019, tetapi kemudian membaik menjadi 32 persen pada 2021. Dalam situasi semacam itu, aktivitas kritik di Youtube juga berhadapan dengan berbagai risiko, dari serangan virtual, serangan fisik, hingga risiko pemidanaan.

Aktivistis Haris Azhar dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan karena unggahan di kanal Youtube "Haris Azhar". Kasusnya bermula saat Haris Azhar mengunggah video berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya Jendral BIN Juga Ada" di kanal Youtube Haris Azhar pada 20 Agustus 2021. Pembahasan topik ini mengundang narasumber tamu Fatia Maulidiyanti, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Dalam video itu disebutkan ada permainan penguasaan tambang oleh empat perusahaan yang teridentifikasi menguasai konsesi lahan tambang di Blok Wabu. Satu di antaranya adalah PT Madinah Qurrata'Ain (PTMQ) yang diduga terhubung dengan Toba Sejahtera Group yang pemegang sahamnya adalah Luhut. Toba Sejahtera Group melalui anak usahanya, PT Tobacom Del Mandiri, yang disinyalir memiliki sebagian saham PTMQ. West Wits Mining sebagai pemegang saham PTMQ membagi saham kepada Tobacom dalam proyek Derewo River Gold Project.

Atas tayangan tersebut, pada 26 Agustus 2021 Luhut Pandjaitan melayangkan somasi kepada Haris Azhar dan Fatia. Kemudian pada 2 September 2021 kuasa hukum Luhut, Juniver Girsang, mengatakan telah mengirimkan somasi kedua kepada Haris dan Fatia. Namun, somasi itu tidak ditanggapi. Haris Azhar mengatakan data-data soal Luhut perihal dugaan tambang di Papua, bukan hal baru. Sebab, laporannya sudah dipublikasi di website Jatam, KontraS, Walhi, dan lain-lain. Data itu sudah lebih dulu dipublikasikan bahkan sebelum wawancara dengan Fatia di kanal Youtube "Haris Azhar". Data yang dimaksud Haris bertajuk "Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya". Laporan ini diluncurkan pada 12 Agustus oleh YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia, bersama #BersihkanIndonesia. Para peneliti melakukan kajian cepat terkait operasi militer ilegal di Papua dengan menggunakan kacamata ekonomi-politik. Masalah di Luhut menurut Haris karena yang bersangkutan tidak mau melihat laporan penelitian dan tidak memahami memahami video yang dipersoalkan tersebut. Padahal, konteks pembahasan dalam video itu adalah *conflict of interest*, pejabat publik yang juga berbisnis di tempat orang sedang menderita. Luhut mencoba membawa masalah ini ke ranah pribadi.

"Itulah karena dia *enggak* mau melihat laporan penelitian dan dia *enggak* memahami video saya. Memangnya saya bahas apa? Conflict of interest. Pejabat publik yang juga berbisnis di tempat orang yang menderita. Nah, kalau dia bilang sebagai manusia, coba cek di laporan tersebut dan coba cek di video saya, memang kita ada bahas kumis dia. Apakah ada yang kita bahas soal keluarganya, apakah ada yang kita bahas cara dia makan dan mengunyah. Tidak. Yang kita bahas jabatan publiknya. Tapi, dia mau menyeret itu ke wilayah personal. (wawancara Haris Azhar, 13 Desember 2021)

Ancaman pemidanaan juga dialami Hersubeno Arief, pemilik kanal Youtube Hersubeno Point. Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta melaporkan Hersubeno ke Polda Metro Jaya terkait pernyataan soal "Megawati koma" di Youtube Hersubeno Point bertajuk "Ketum PDIP Megawati Dikabarkan Koma dan Dirawat di RSPP". Video diunggah pada 9 September 2021. Dalam video berdurasi 12 menit itu, awalnya Hersubeno membacakan kembali rumor yang beredar soal kondisi kesehatan Megawati. Menurut Hersubeno Arief, rumor soal kondisi Megawati itu bahkan mengalahkan berita kebakaran Lapas Kelas I Tangerang. Kabar ini ia dapatkan dari WhatsApp dari temannya seorang dokter yang mengabarinya soal kondisi Megawati. Berikut kutipan dari tayangan Youtube Hersubeno Point.

"Ketua Umum DPP Partai PDIP Megawati Soekarnoputri sejak kemarin, Rabu, 8 September 2021, dirawat di RSPP Jakarta, kondisinya sangat mengkhawatirkan bahkan disebut-sebut sudah koma. Rumor politik ini menjadi berita paling hot di media sosial, bahkan di sejumlah media massa. Beritanya bahkan mengalahkan berita yang sekarang menjadi sorotan dunia internasional, yakni kebakaran Lapas Tangerang yang mengakibatkan 41 napi tewas dan puluhan lainnya luka-luka,"

Namun Hersubeno menegaskan belum ada kepastian soal rumor tersebut. Terlebih, tidak adanya pernyataan pasti dari fungsionaris PDIP saat itu.

"Sampai sejauh ini belum ada kepastian apakah Megawati Soekarnoputri benar-benar sakit dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Sejumlah pengurus pusat PDIP, DPP PDIP membantah kabar tersebut, namun sebagian menolak berkomentar dan juga mengaku bingung dan mereka meminta menanyakan langsung ke Sekjen DPP PDIP Hasto."

Kabar bahwa Megawati koma dan kritis dibantah oleh partai tersebut. DPD PDI-P Jakarta kemudian melaporkan Hersubeno ke polisi atas tuduhan menyebarkan hoaks atau berita bohong. Menurut Wakil Ketua DPD PDI-P Jakarta Ronny Talapessy, informasi yang disampaikan Hersubeno itu sangat provokatif dan berbahaya serta merugikan partai berlogo banteng itu. Hersubeno dilaporkan dengan Jerat UU ITE Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat A Undang-Undang ITE dan Pasal 14 atau Pasal 15 KUHP.

Diketahui, Hersubeno Arief tercatat sebagai jurnalis di Forum News Network (FNN). Pimred FNN Mangarahon Dongaran menilai pelaporan PDIP Jakarta terhadap Hersubeno Arief salah alamat. Mangarahon menilai pernyataan Hersubeno sebagai produk jurnalistik, sehingga kalau ada masalah harusnya dilaporkan ke Dewan Pers. Menurut Dewan Pers, FNN sendiri sudah mendaftar ke Dewan Pers. Kasus ini akhirnya tidak diproses di kepolisian dan menguap begitu saja.

Menurut Haris Azhar, penggunaan hukum untuk menyerang lawan secara tidak fair sebenarnya gaya lama. Modusnya, dicari kelemahannya, misalnya yang bersangkutan pernah salah melakukan apa, lalu dicari unsur pidananya, kemudian diserang. Contoh menanggapi kritik Rizieq Shihab. Negara tidak menantang materi kritiknya, tapi dicari celah pidanya. Lalu ketemu kasus dia kumpul-kumpul di saat pandemi, lalu dipidana. Kalau dilihat materinya memang ada unsur pidana, tapi masalahnya yang dipidana hanya yang berseberangan dengan kekuasaan. Jika yang berkumpul adalah pro kekuasaan, tidak ada pidananya. Di situ muatan politisnya kelihatan.

Dalam melakukan serangan kepada kelompok kritis, negara juga menggunakan elemen *civil society*. Menurut Refly Harun, negara menggunakan instrumen vertikal dan instrumen horisontal sekaligus. Instrumen vertikal-nya berupa penegak hukum yang makin koersip. Sedangkan instrumen horisontalnya adalah para *buzzer* yang makin semakin bebas melakukan ujaran kebencian tanpa risiko pembedaan. Rezim memelihara elemen *civil society* untuk menghantam *civil society* lainnya. Polanya beda dengan rezim Orde Baru. Pada masa Orde Baru, kelompok kritis langsung berhadapan dengan alat negara Kodam, Kodim, tentara, dan polisi. Sekarang yang dihadapi bukan hanya alat negara, tapi juga elemen *civil society*. Pada kenyataannya, saat ini elemen *civil society* yang endorse negara untuk “menggebuk” elemen masyarakat kritis sudah berkembang, bukan hanya menggunakan ormas tradisonal, tapi juga menggunakan “ormas digital”. Mereka seperti organisasi tanpa bentuk yang bisa menyerang siapa saja tanpa ada konsekuensi pidana.

Kanal Youtube Hersubeno Point pernah mengalami serangan bertubi-tubi. Menurut pengelolanya, Hersubeno Point selalu diserang dengan report ke Youtube bahwa konten kanal tersebut berisi *sex and nudity*. Laporan ke Youtube itu berlangsung terus menerus. Akhirnya tayangan Hersubeno Point di-*banned*, tidak bisa masuk area Indonesia. Konsekuensinya, orang yang *subscribe* tidak akan mendapat notifikasi tapi kontennya masih bisa dicari secara random. Masalah ini sudah dikomunikasikan dengan pihak Youtube untuk ditanyakan, apakah ada masalah di kanal Hersubeno Point. Jawaban Youtube adalah tidak ada. Menurut Youtube, masalah datang dari dalam negeri Indonesia. Akhirnya kanal Hersubeno Point dipindah areanya ke Amerika Serikat. Sekarang laporan *sex and nudity* itu tidak ada lagi. Meski begitu, Hersubeno tidak berniat mengembalikan lagi ke area Indonesia.

Dari sejumlah serangan virtual itu, apakah ada buktinya negara terlibat? Haris Azhar menyebut indikasi berupa pembiaran oleh negara. Negara selalu meminta penuduh untuk memberikan bukti. Itu adalah cara lama yang selalu dikatakan negara. Situasinya seperti yang terjadi di awal reformasi 1998. Negara menciptakan front-front untuk menghadang kelompok kritis karena aparat negara tidak ingin maju sendiri. Karena aparat sedang disorot, maka mereka tidak maju sendiri karena takut dituduh melanggar HAM. Supaya tidak dituduh pelanggaran HAM, maka diciptakan simpul-simpul masyarakat yang sebetulnya dikontrol oleh negara untuk menyerang kelompok-kelompok sipil lainnya. Bedanya, dulu menciptakan ormas-ormas riil, saat ini yang diciptakan adalah “ormas-ormas digital”.

Ilmuwan politik Djayadi Hanan menyatakan, jika pemerintah tidak mau dituding berada di balik aktivitas *buzzer* yang menyerang kelompok kritis, maka pemerintah harus tegas bahwa pemerintah tidak menggunakan *buzzer*. Penggunaan akun anonim atau bot secara massif dengan sasaran serangan kepada kelompok kritis merupakan indikasi kuat bahwa negara ada di balik aktivitas tersebut. Sebab, untuk menggerakkan mereka membutuhkan dana yang besar, sedangkan yang memiliki kemampuan men-

trace adalah pemerintah. Jadi, kalau ada pembiaran akun anonim atau bot, maka tuduhan mereka merupakan agen negara memiliki dasar argumentasi yang kuat.

Meminimalisasi Risiko dengan Bergabung di Lembaga Pers

Adanya ancaman, khususnya ancaman pidana, membuat sejumlah aktivis Youtube membentuk perusahaan pers sebagai ikhtiar untuk mencegah kriminalisasi. Sejauh ini ada dua kelompok media tempat mereka bernaung yaitu FNN dan SNN. *Pertama*, kelompok yang tergabung dalam Forum News Network dengan alamat website di fnn.co.id. Sebutan familiar media ini adalah FNN. FNN menggambarkan diri mereka sebagai portal berita umum yang hadir untuk memenuhi kebutuhan informasi yang benar, akurat, dan berimbang. Digawangi oleh sejumlah wartawan senior, FNN bertekad menjadi acuan informasi terpercaya baik di dalam maupun luar negeri. FNN juga menyatakan diri mereka nonpartisan. Visi FNN adalah menjadi pers perjuangan yang profesional. Misinya adalah mengawal tujuan bernegara.

Pemimpin redaksi FNN Mangarahun Dongoran menjelaskan, FNN berdiri pada April 2018 di bawah PT Forum Adil Mandiri. PT ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Karena tidak eksis maka kemudian dipaiki sebagai badan hukum FNN. Dengan tagline “mengawal tujuan bernegara”, media ini didirikan karena keprihatinan sejumlah jurnalis yang melihat media mainstream sejak 2016 kurang memperhatikan keinginan rakyat, khususnya yang berseberangan dengan pemerintah. FNN sudah didaftarkan ke Dewan Pers sebagai perusahaan pers dan sudah diregistrasi pada 2 Oktober 2019. Kemudian pada 18 Desember 2020 didaftarkan kembali ke Dewan Pers beserta channel Youtube yang tergabung di dalamnya. Saat ini, total ada 15 channel Youtube yang didaftarkan ke dewan pers. Meski sudah didaftarkan, hingga Desember 2021, Dewan Pers belum melakukan verifikasi faktual. Relasi antara institusi dengan pengelola channel Youtube tersebut bersifat organik, dalam arti mereka masuk dalam struktur redaksi. Mengenai hak dan kewajiban jejaring channel Youtube tersebut, di antara mereka ada yang berkontribusi kepada lembaga, ada juga yang belum. Tergantung jumlah subscriber dan pendapatan dari AdSense. Untuk yang subscribarnya kecil dan belum mendapat iklan AdSense yang signifikan, mereka belum berkontribusi. Hingga saat ini, bentuk dan proporsi sharing belum dirumuskan. Namun, ke depan akan dibuat rumusan sehingga jelas hak dan kewajiban masing-masing.

Terkait dengan penentuan isu atau topik yang akan dipublikasikan di channel Youtube, koordinasinya bersifat longgar. Pemimpin redaksi mempercayakan kepada masing-masing Youtuber, karena umumnya mereka sudah memahami kode etik jurnalistik, sudah paham UU pers. Namun, untuk isu-isu yang sensitif harus ada koordinasi dengan lembaga karena harus dilihat apakah bermasalah atau tidak. Sebab, dalam publikasi konten juga harus memperhatikan keamanan perusahaan dan keamanan dari kantor. Rapat biasanya dilakukan sepekan sekali via zoom. Mekanisme perlindungan sendiri dilakukan jika ada permasalahan, seperti kasus yang dialami Hersubeno Arief. Dalam kasus ini, pemimpin redaksi akan me-review apakah ada pelanggaran atau tidak dari sisi kode etik jurnalistik. Sebagai institusi jurnalistik, FNN juga membuka ruang hak jawab jika ada kesalahan dalam konten yang dipublikasikan. Jika ada masalah, maka lembaga akan menjelaskan bahwa jejaring Youtube yang dimasalahkan merupakan produk pers yang dilindungi UU pers, mematuhi kode etik, dan berada di bawah naungan perusahaan pers.

Dari sisi FNN sendiri, menurut Mangarahun, website fnn.co.id beberapa kali diserang, di-takedown. Bukan hanya fnn.co.id tapi juga channel FNN TV. Tiga kali channel tersebut kena take down. Pihak Youtube mengkonfirmasi ada permintaan dari

pemerintah. Mangarahun menjelaskan, berdasarkan data permintaan takedown ke Youtube, permintaan dari pemerintah Indonesia tercatat paling banyak. Selain itu, ada konten tertentu yang oleh nara sumber diminta di-takedown. Misalnya wawancara dengan ekonom Rizal Ramli. Dia meminta agar wawancaranya di-takedown sementara.

Kedua adalah kelompok aktivis Youtube yang tergabung dalam Satu Indonesia News Network (SNN) dengan alamat website di satuindonesia.news. Mereka mendeskripsikan diri sebagai media massa era baru, era kolaborasi antar media dan individu dalam membangun kekuatan jaringan, memberdayakan *citizen journalist* untuk menjadi pemberita yang profesional. Media ini memadukan sejumlah platform, dengan memindahkan media televisi ke media sosial. SNN membuka kesempatan untuk bekerjasama dalam membangun jaringan pemberitaan, baik para pegiat *citizen journalism* maupun media massa pada umumnya. SNN beroperasi di bawah PT Satu Indonesia Media Utama yang sudah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia per 24 Februari 2021. Pemimpin redaksi SNN adalah Eko Satiya Hushada yang merupakan mantan pemimpin redaksi koran Indopos. Menurut Eko Satiya, berdirinya SNN dilatari oleh pengambilan channel Youtube Gus Nur (Sugi Nur Raharja) oleh aparat karena ada kasus hukum. Pada saat itu, Munjiat Channel milik Gus Nur yang sudah memiliki 500 ribuan subscriber diambil oleh aparat dan tidak dikembalikan. Dilatari kekhawatiran tindakan represi aparat yang mengambil channel Youtube, maka dalam pertemuan antara Eko Satiya, Refly Harun, dan Neno Warisman dibentuklah perusahaan media pers bernama Satu Indonesia News Network. Tujuannya mewadahi dan melatih *citizen journalist* agar memahami kode etik jurnalistik, sehingga mereka bisa bekerja secara lebih profesional. Selain itu juga sebagai payung untuk mereka sehingga tidak mudah dikriminalisasi ketika ada persoalan hukum. Jadi, ide dasar SNN adalah menjadikan para *citizen journalist* menjadi lebih profesional dan sekaligus menjadi rumah besar bagi mereka. Untuk para anggota jaringan SNN, di layar Youtube mereka dipasang logo SNN sebagai tanda bahwa ini merupakan bagian dari jaringan media. SNN didaftarkan ke Dewan Pers pada 3 Maret 2021. Statusnya saat ini terdaftar di Dewan Pers, namun belum diverifikasi faktual karena ada beberapa syarat yang belum terpenuhi. Di antaranya status kekaryawanan, BPJS dan masalah administratif lainnya.

Pendiri SNN, Refly Harun, mengakui salah satu tujuan membentuk SNN adalah untuk meminimalisasi risiko pemidanaan. Terkait kegiatan, Refly menegaskan apa yang dilakukan dari sudut pandang definisi pers adalah termasuk kegiatan jurnalistik. Mekanisme redaksional di SNN sendiri bersifat gotong-royong. Ada hubungan mutualisme antara channel anggota dan lembaga SNN sendiri. Refly mengaku jika tidak ada risiko pemidanaan dalam ber-Youtube, dirinya tidak akan repot-repot membuat lembaga pers.

Ilmuwan politik Djayadi Hanan melihat apa yang dilakukan oleh aktivis Youtube bergabung dalam naungan lembaga pers adalah memanfaatkan instrumen demokrasi yang sudah ada yakni UU Pers. Instrumen demokrasi tersebut sudah terlanjur diberikan dan tidak mudah ditarik kembali. Bahwa kelompok kritis ini ada rasa takut untuk dikriminalisasi itu terkonfirmasi. Tapi, pada saat yang sama, mereka sadar ada instrumen hukum yang bisa dipakai untuk melindungi diri. Ini menunjukkan adanya mekanisme yang tidak sepenuhnya bisa dikontrol untuk penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, di satu sisi orang takut dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, tapi di sisi lain, orang melihat ada mekanisme demokratis yang bisa dipakai untuk melindungi diri dari penyalahgunaan itu. Ini kemudian menjadi persoalan kontestasi antara *state* dan *civil society*.

KESIMPULAN

Dalam relasi antara negara (*state*) dan masyarakat (*civil society*) di Indonesia era pemerintahan Presiden Joko Widodo, peran negara semakin kuat dibanding dengan masyarakat sipil. Ini berbeda dengan situasi di awal reformasi di mana masyarakat sipil menguat sedang negara melemah. Hubungan negara dan masyarakat sempat menemukan titik keseimbangan, namun belakangan negara semakin menguat. Negara semakin menunjukkan hegemoninya dengan memaksakan kehendak kepada rakyat, baik melalui instrumen koersi aparat negara, maupun instrumen persuasi yang menggunakan masyarakat sipil.

Pada saat yang sama, kelompok kritis menemukan medan baru untuk mencegah hegemoni negara semakin kuat melalui media sosial Youtube. Wacana alternatif untuk pendidikan kewargaan sekaligus kontrol politik didesiminasikan melalui Youtube secara gencar oleh sekelompok kecil cendekiawan maupun aktivis. Namun, aktivitas ini bukan tanpa risiko, sebab dalam kenyataannya mereka harus berhadapan dengan ancaman, mulai dari pemidanaan hingga ancaman serangan virtual dari “ormas digital” bentukan negara. Dialektika antara negara dan kelompok kritis ini akan terus terjadi. Hanya mungkin intensitasnya yang akan mengalami pasang surut. Rezim akan terus memperkuat diri untuk melanggengkan kekuasaan, namun pada saat yang sama mereka tidak bisa begitu saja menarik instrumen demokrasi yang sudah sempat dibuat di awal reformasi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Haris Azhar, Hersubeno Arief, dan Refly Harun yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi nara sumber penelitian ini. Terima kasih juga untuk Pemimpin Redaksi FNN, Mangarahon Dongoran, dan Pemimpin Redaksi SNN, Eko Satiya Hushada yang membantu menjelaskan relasi lembaga yang mereka pimpin dengan para aktivis Youtube. Kepada pakar komunikasi politik Gun Gun Heryanto dan pakar politik Djayadi Hanan juga penulis ucapkan terima kasih. Perspektif yang mereka kemukakan membantu penulis memahami fenomena yang sedang diteliti.

REFERENSI

- Anderson, B. R.O'G, (1991), *Gagasan tentang Kekuasaan dalam Budaya Jawa*, dalam Budiardjo, M. (ed.), *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Boggs, C. (1976), *Gramsci's Marxism*, Pluto Press, London
- Carr, C. T. and Hayes, R. A. (2015), *Social Media: Defining, Developing, and Divining*, Atlantic Journal of Communication, hal. 46-65.
<https://doi.org/10.1080/15456870.2015.972282>
- Dataportal.com, Digital 2021: Indonesia, <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>. Diakses 28 Desember 2021
- Dw.com, *Indeks Demokrasi 2020: Indonesia Catat Skor Terendah dalam 14 Tahun Terakhir*, 4 Februari 2021. <https://www.dw.com/id/indeks-demokrasi-indonesia-catat-skor-terendah-dalam-sejarah/a-56448378>. Diakses 28 Agustus 2021. Diakses 28 Desember 2021.
- Goode, L. (2005), *Jürgen Habermas: Democracy and the Public Sphere (Modern European Thinkers)*, Pluto Press, Northampton
- Gramsci, A. (2013), *Prison Notebook; Catatan-Catatan dari Penjara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere*, (trans.) Thomas Burger, Polity Press.
- Heryanto, A. (1997), Hegemoni Kekuasaan versi Gramsci, Forum Keadilan
- Hendarto, H. (1993). Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci: dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, Gramedia, Jakarta.
- Hobden, S. & Jones, R. W. (2001). *Marxist Theories of International Relations dalam Baylis, John & Smith, S. (eds.), The Globalization of World Politics*, Oxford University Press, Oxford.
- Katadata.co.id, *Kebebasan Pers Indonesia Memburuk Sejak 2020, 4 Mei 2021*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/04/kebebasan-pers-indonesia-memburuk-sejak-2020>, Diakses 28 Desember 2021.
- McKee, A.(2005). *The Public Sphere: An Introduction*, Cambridge University, Cambridge
- Mujani, S., & Liddle, R. W. (2021), *Indonesia: Jokowi Sidelines Democracy, Journal of Democracy*, Volume 32, Number 4, October 2021, hal. 72-86. <https://doi.org/10.1353/jod.2021.0053>
- Noor, D. (1986). *Perkembangan Demokrasi Kita*, dalam *Demokrasi dan Proses Politik*, LP3ES, Jakarta.
- Potter, A. (1968). *Opposition with a Capital "O"*, Yale University Press, New Haven and London.
- Simon, R.(1999). *Gramsci's Political Thought: An Introduction*, Elecbook, London
- Uhlir, A.(1998). *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, Mizan, Bandung
- Van Dijck, J., & Poell, T. (2013). *Understanding Social Media Logic*, Media and Communication, Vol. 1, Issue 1, hal. 2-14. <https://doi.org/10.17645/mac.v1i1.70>

Nara Sumber

- Haris Azhar (kanal Youtube "Haris Azhar"), wawancara 13 Desember 2021
- Hersubeno Arief (kanal "Hersubeno Point"), wawancara 13 Desember 2021
- Refly Harun (kanal Youtube "Refly Harun"), wawancara 16 Desember 2021
- Mangarahon Dongoran (Pemimpin Redaksi FNN), wawancara 20 Desember 2021
- Eko Satiya Hushada (Pemimpin Redaksi SNN) wawancara 24 Desember 2021
- Gun Gun Heryanto (Doktor Ilmu Komunikasi, Pengajar UIN Syarif Hidayatullah), wawancara 22 Desember 2021
- Djayadi Hanan (PhD Ilmu Politik, Direktur LSI, Pengajar UIII), wawancara 24 Desember 2021